

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perolehan Hak Guna Bangunan dari Hak Milik oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Terdapat kendala yang menjadi hambatan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dalam mempersiapkan syarat permohonan Hak Guna Bangunan adalah kendala validasi lamanya pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada :

1. Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Banyumas agar lebih meningkatkan penyuluhan tentang hukum pertanahan khususnya mengenai peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya.
2. Kantor Pajak Purwokerto supaya membuat jadwal validasi agar pemohon Hak Guna Bangunan segera mengajukan permohonan.
3. Masyarakat khususnya pemilik tanah di Kabupaten Banyumas agar memiliki kesadaran hukum untuk mengurus sertipikat hak milik atas tanah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Pertama, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajo Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta*, Perspektif, edisi Juli, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, edisi pertama, Kencana, Jakarta.

Jurnal/artikel:

- Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H., *Jenis-jenis Hak atas Tanah dan Dapat Menjadi Pemegangnya*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eeb3b383296d>

/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapat-menjadi-pemegangnya/#_ftn10. Diakses tanggal 11 Desember 2020.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, 2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*, Vol.2. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/218>. diakses tanggal 2 Desember 2020.

Pdambanyumas, 2011, *maksud dan tujuan*, <http://www.pdambanyumas.com/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504162339BAB_II_GAMBARAN_UMUM_DAN_KONDISI_WILAYAH.pdf. Diakses 19 April 2021.

<https://www.tribunnewswiki.com/2021/01/06/kecamatan-sumbang-kabupaten-banyumas#:~:text=TRIBUNNEWSWIKI.COM%20%2D%20Sumbang%20merupakan%20salah,meter%20di%20atas%20permukaan%20laut>. Diakses 19 April 2021.

Rizkita Widya Murwani, Widodo Suryandono, *Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1611k/Pdt/2017)*, Universitas Indonesia

membeli Tanah Untuk Kegiatan Perusahaan <http://www.legalakses.com/memperoleh-tanah-untuk-perusahaan/>, diakses 23 April 2021

Arief Syaifullah, 2014, *Survey Kadastral, modul I-IX, edisi revisi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Hlm 1.* <http://prodi1.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Modul-Survei-Kadastral.pdf>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

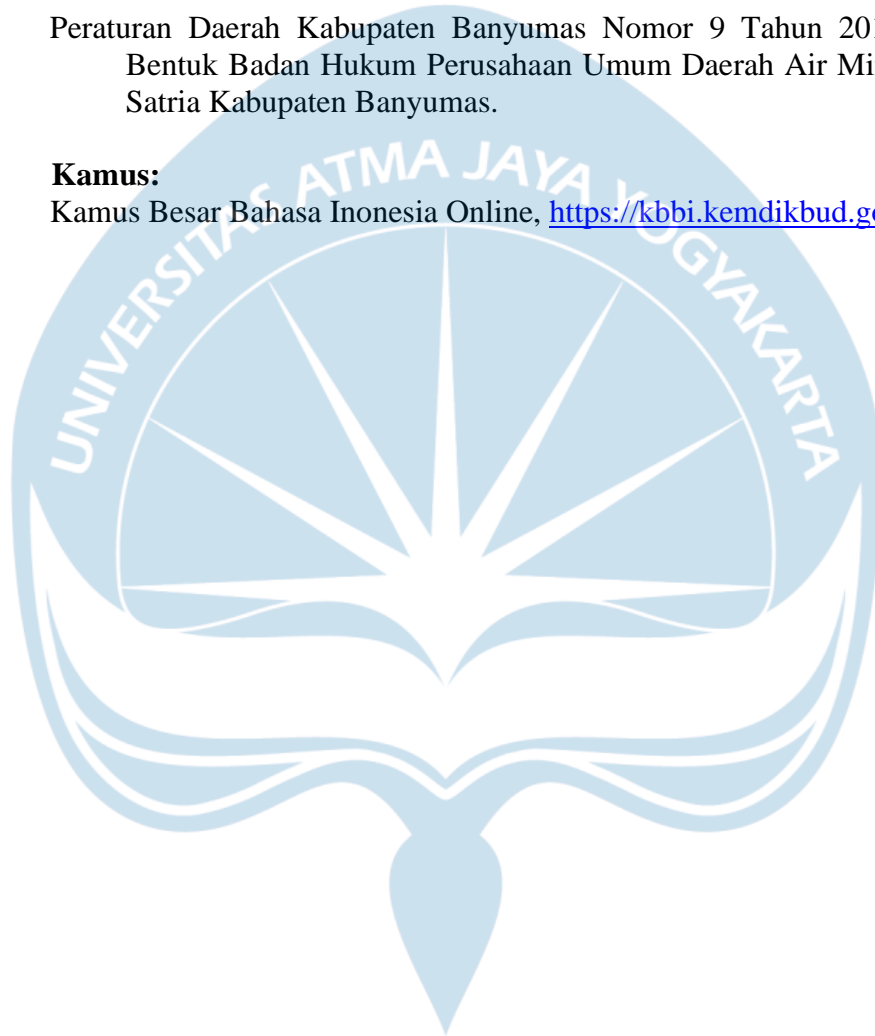
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

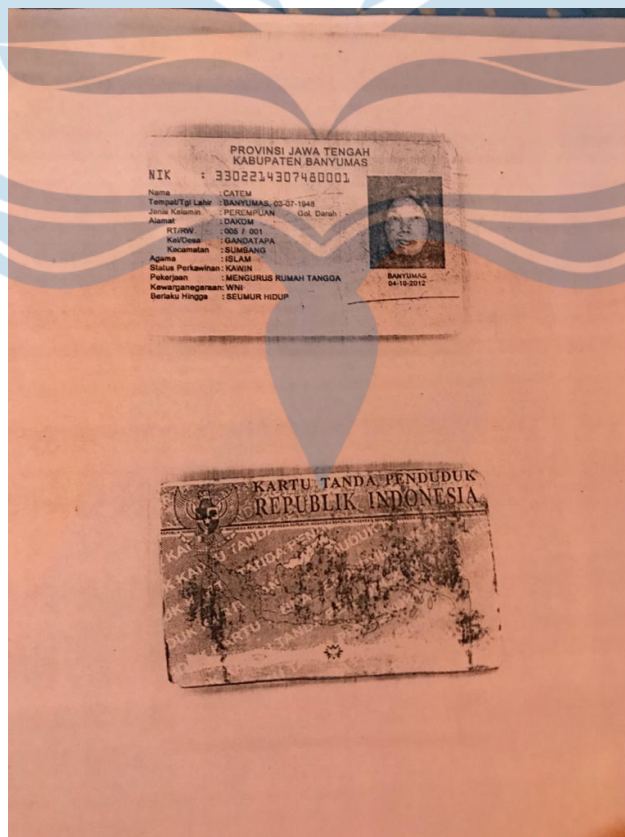
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



Lampiran 1



Lampiran 2

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA SATRIA**
Jl. Prof. Dr. Suharno No. 52 PURWOKERTO 53114
Telepon : 0281-632324
Faksimile : 0281-641054
Email : rdan_banayama@yahoo.com
Website : www.pdambanayama.com

Nomor : 070/050/1/2021
Lampiran :
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Purwokerto, 05 Maret 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Menunjuk surat Saudara nomor 0067V/CVD-FH tanggal 17 Februari 2021 Perihal Permohonan Riset, dengan ini kami memberikan izin kepada :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rit Madeline Azaria S.	170512744	Hukum

Untuk melaksanakan Penelitian di PERUMDA Air Minum Tirta Satria mulai tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021. Untuk pelaksanaannya diminta agar yang bersangkutan terlebih dahulu menghubungi Bagian Kesekretariatan PERUMDA Air Minum Tirta Satria.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

DIREKSI PERUMDAM TIRTA SATRIA
Direktur Umum

CHARIS SETYABUDI, S.E.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Manajer Kesekretariatan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran 3

